

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGLI NO.37 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGLI YANG MEMPENGARUHI MINAT  
WISATAWAN**

Anita Kusumadewi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati  
Denpasar  
Email: nitakusumadewi31@gmail.com

***Abstract***

*The enactment of Regional Regulation number 37 of 2019 concerning Retribution for Tourism Attraction Objects (OTDW) in Kintamani is aimed at following up on the arrangement of objects, maintaining order, visitor comfort while increasing Bangli district's original income. However, in practice it has invited prolonged polemics from many parties. Pros and cons occur not only among the wider community, small traders, tourism entrepreneurs, but also internal turmoil in the local government, especially regarding the understanding and application of these regulations. The implementation of regional regulations that are not in accordance with the aspirations of the community and tourism actors can disrupt the smooth flow of traffic and harm the community as well as the process of distributing levy funds to the village itself. This research is to find out the process of distributing retribution in Bangli Regency. Research with interview, observation and documentation methods is presented in a narrative manner.*

**Keywords:** *Bangli Regency, Retribution, Tariff*

***Abstrak***

Pemberlakuan Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (OTDW) di Kintamani ditujukan untuk menindaklanjuti penataan obyek, menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bangli. Namun dalam pelaksanaannya telah mengundang polemik berkepanjangan dari banyak pihak. Pro kontra terjadi

tidak hanya dikalangan masyarakat luas, pedagang kecil, pengusaha wisata, namun juga kegalauan diinternal pemerintah daerah terutama terkait pemahaman dan penerapan peraturan tersebut. Penerapan perda yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat serta proses penyalunan dana retribusi kepada desa itu sendiri .Penelitian ini untuk mengetahui proses penyaluran retribusi di Kabupaten Bangli. Penelitian dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi disajikan secara naratif.

**Keywords: Kabupaten Bangli, Retribusi, Tarif**

